



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 188815

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp. 370.000.000	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp. 355.100.000	
1.	MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2.	MOBIL, HONDA HR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.100.000		
3.	MOTOR, YAMAHA 2DP-RA/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp. ----	
D. SURAT BERHARGA		Rp. ----	
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp. 339.858.513	
F. HARTA LAINNYA		Rp. ----	
Sub Total		Rp. 1.064.958.513	
III. HUTANG		Rp. 106.760.000	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 958.198.513	

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnpkp.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnpkp.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.